

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEMENTERIAN LUAR NEGERI							6,251,765	6,876,942	7,564,636	8,321,099	9,153,209		
1	Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh						50,422	55,465	61,011	67,112	73,823	Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional	89%	90%	92%	94%	95%							
2	Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri						4,485,216	4,933,738	5,427,111	5,969,822	6,566,805	Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: 1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan	78	80	81	83	85							
	2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	25	35	45	55	65							
	3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	23	30	38	50	60							
3	Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional						26,615	29,277	32,204	35,425	38,967	Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	70%	72.4%	75%	77.3%	79.4%							
4	Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik						25,474	28,021	30,824	33,906	37,296	Ditjen. Protokol dan Konsuler	
	Indikator Kinerja: Hasil evaluasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB	Baik	Baik	Amat Baik	Amat Baik	Amat Baik							
5	Kebijakan luar negeri yang berkualitas						8,177	8,995	9,894	10,884	11,972	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	
	Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi yang diimplementasikan	70%	70%	70%	70%	70%							
6	Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat						49,622	54,584	60,043	66,047	72,652	Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Indeks diplomasi maritim dan perbatasan	39%	54.43%	66.29%	81.89%	97.50%							
7	Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat						17,442	19,186	21,105	23,215	25,537	Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima	90%	92%	93%	94%	95%							
8	Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat						100,210	110,231	121,254	133,380	146,717	Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Indeks peran Indonesia	88%	89%	90%	90%	91%							
9	Diplomasi ekonomi yang kuat						30,974	34,071	37,478	41,226	45,349	Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Sekretariat Jenderal, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Indeks diplomasi ekonomi	67%	72%	79%	85%	92%							
10	Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima						81	89	98	108	119	Ditjen. Protokol dan Konsuler, Perwakilan RI	
	Indikator Kinerja: Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora	58%	60.7%	65.1%	70%	74.8%							
11	Monitoring hasil diplomasi yang efektif						33,769	37,145	40,860	44,946	49,441	Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Sekretariat Jenderal	
	Indikator Kinerja: Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri	10%	10%	10%	10%	10%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	12 SDM yang berkompeten						454,773	500,251	550,276	605,303	665,834	Sekretariat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	50%	60%	70%	80%	90%							
	13 Organisasi dan tata kelola yang baik						172,667	189,934	208,928	229,820	252,802	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu	60	75	85	90	95							
	14 Lingkungan kerja yang kondusif						262,107	288,318	317,150	348,865	383,751	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK	
	Indikator Kinerja: Indeks kepuasan pegawai	65%	70%	75%	80%	85%							
15 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi						237,510	261,261	287,388	316,126	347,739	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK		
Indikator Kinerja: 1. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1,5	2	2,5	3	3,5								
2. Indeks Peningkatan e-Government Indonesia (PEGI)	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75								
16 Anggaran yang optimal						296,704	326,375	359,012	394,914	434,405	Sekretariat Jenderal, Sekretariat Seluruh Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPPK, Perwakilan RI		
Indikator Kinerja: Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja	95%	96%	97%	98%	99%								
Program: Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN						60,204	66,224	72,847	80,132	88,145	Ditjen KS ASEAN		
Sasaran Program: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat													
1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan	90%	92%	93%	94%	95%								
Sasaran Program: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN													
2 Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN	85%	87%	89%	90%	92%								
3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat Nasional	97%	97%	97%	97%	97%								
Kegiatan: Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan						11,770	12,947	14,241	15,666	17,232	Dit. Politik Keamanan ASEAN		
Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang politik dan keamanan													
1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan kerja sama ASEAN	90%	92%	94%	95%	96%								
Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN di bidang dan keamanan													
2 Persentase responden yang memahami kerja sama politik dan keamanan ASEAN	87%	88%	89%	90%	90%								
3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Politik dan Keamanan di tingkat Nasional	97%	97%	97%	97%	97%								
Kegiatan: Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi						6,764	7,441	8,185	9,003	9,903	Dit. Kerjasama Ekonomi ASEAN		
Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang ekonomi													
1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar ekonomi ASEAN	85%	85%	87%	87%	90%								
Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri													
2 Persentase responden yang memahami kerja sama ekonomi ASEAN	85%	85%	87%	87%	90%								
3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Ekonomi di tingkat Nasional	85%	87%	90%	92%	94%								
Kegiatan: Kerjasama ASEAN bidang Fungsional						5,605	6,165	6,782	7,460	8,206	Dit. Kerjasama Fungsional ASEAN		
Sasaran Kegiatan: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang sosial budaya													
1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar sosial budaya ASEAN	85%	87%	89%	91%	93%								

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri													
	2. Persentase Responden yang memahami kerja sama Sosial Budaya ASEAN	85%	87%	89%	91%	93%								
	3. Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang Sosial Budaya di tingkat Nasional	98%	98%	98%	98%	98%								
Kegiatan: Kerjasama ASEAN dengan mitra wicara dan antar kawasan							5,687	6,255	6,881	7,569	8,326			Dit. Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN
	Sasaran Kegiatan: Kepercayaan Indonesia di ASEAN yang meningkat dalam kerja sama dengan													
	1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional	85%	86%	87%	88%	89%								
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri													
	2. Persentase responden yang memahami kerja sama ASEAN dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional	82%	85%	87%	88%	89%								
							30,379	33,417	36,758	40,434	44,478			Setditjen KS Asean
	Sasaran Kegiatan: Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri													
	1. Persentase responden yang memahami kerja sama ASEAN	85%	87%	89%	91%	93%								
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam rangka penguatan													
	2. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen Kerja Sama ASEAN	90%	91%	93%	94%	95%								
	3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Kerja Sama ASEAN	75	76	77	78	79								
	4. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	60%	63%	65%	67%	70%								
	5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen Kerja Sama ASEAN	80%	82%	84%	86%	88%								
Program: Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral							544,585	599,043	658,947	724,842	797,326			Ditjen Multilateral
	Sasaran Program: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral													
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral	90%	90%	90%	90%	90%								
	Sasaran Program: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral													
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	85%	85%	85%	85%	85%								
	Sasaran Program: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku													
	3. Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	90%	90%	90%	90%	90%								
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, dan Terorisme							11,867	13,054	14,359	15,795	17,375			Dit. KIPS
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral													
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019	90%	90%	90%	90%	90%								
	2. Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,	90%	90%	90%	90%	90%								
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral													
	1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019	100%	100%	100%	100%	100%								
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan	90%	90%	90%	90%	90%								
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku													
	1. Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun	90%	90%	90%	90%	90%								
	2. Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata	90%	90%	90%	90%	90%								
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan							6,386	7,025	7,727	8,500	9,350			Dit. HAM dan Kemanusiaan
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral													
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual	90%	90%	90%	90%	90%								
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral													
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur,	85%	85%	85%	85%	85%								
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku													
	3. Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu	60%	60%	60%	60%	60%								
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual							3,770	4,147	4,562	5,018	5,520			Dit. PPIH
	Sasaran Kegiatan:													
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual	90%	90%	90%	90%	90%								

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral														
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual	85%	85%	85%	85%	85%									
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku														
	3. Persentase rekomendasi tentang perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	90%	90%	90%	90%	90%									
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup							4,097	4,507	4,957	5,453	5,999			Dit. PELH	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia dalam forum multilateral														
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	85%	85%	85%	85%	85%									
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral														
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup	80%	80%	80%	80%	80%									
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku														
	3. Persentase rekomendasi tentang pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	85%	85%	85%	85%	85%									
Kegiatan: Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial, Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang							5,297	5,827	6,409	7,050	7,755			Dit. Sosbud & OINB	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral														
	1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu sosial budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang	90%	90%	90%	90%	90%									
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral														
	2. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang	80%	80%	80%	80%	80%									
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku														
	3. Persentase rekomendasi tentang sosial budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional	85%	85%	85%	85%	85%									
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Multilateral							513,167	564,484	620,932	683,026	751,328			Setditjen Multilateral	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral														
	1. Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada organisasi internasional	75%	75%	75%	75%	75%									
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral														
	2. Persentase rekomendasi yang dikeluarkan dalam mengkaji dan memverifikasi pembayaran kontribusi dan status keanggotaan Indonesia pada OI	90%	90%	90%	90%	90%									
	3. Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya	90%	90%	90%	90%	90%									
	Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Anggaran														
	4. Persentase realisasi anggaran Ditjen Multilateral	90%	90%	90%	90%	90%									
	Sasaran Kegiatan: Organisasi dan tata kelola yang baik														
	5. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Multilateral	70	71	72	73	74									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen														
	6. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	60%	65%	70%	75%	80%									
	Sasaran Kegiatan: Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku														
	7. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen Multilateral	95%	95%	95%	95%	95%									
Program: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							132,707	145,978	160,576	176,633	194,297			Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	
	Sasaran Program: Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat														
	1. Presentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	70%	72%	74%	76%	78%									
	2. Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerjasama intrakawasan	80%	80%	80%	80%	80%									
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika							4,099	4,509	4,960	5,456	6,001			Dit. Afrika	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Afrika yang meningkat														
	1. Jumlah Kesepakatan Kerjasama	8	10	12	14	16									
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	36	37	38	39	40									
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah							3,919	4,311	4,742	5,216	5,738			Dit. Asia Selatan dan Tengah	
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang meningkat														

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	10	10	11	11	12									
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	22	22	22	23	23									
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar							7,078	7,786	8,564	9,421	10,363	Dit. Asia Timur dan Pasifik			
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang meningkat														
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	21	22	22	22	22									
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	25	26	27	29	30									
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah							3,630	3,993	4,392	4,831	5,315	Dit. Timur Tengah			
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Timur Tengah yang meningkat														
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	7	8	9	9	9									
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	29	29	29	29	29									
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							85,366	93,902	103,293	113,622	124,984	Dit. KIK Aspasaf			
	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di forum kerja sama intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika yang														
	1. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum kerjasama intrakawasan	64	64	64	65	65									
	2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerjasama intrakawasan yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	23	23	23	24	24									
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika							28,616	31,477	34,625	38,088	41,896	Setditjen Aspasaf			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Aspasaf														
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika	95%	95%	95%	95%	95%									
	2. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	68,01	69	70	71	72									
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	75%	76%	77%	78%	79%									
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	95%	95%	95%	95%	95%									
	5. Persentase pemenuhan laporan dan penyediaan data	98%	98%	98%	98%	98%									
Program: Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional							39,117	43,029	47,332	52,065	57,272	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional			
	Sasaran Program: Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian														
	1. Persentase Jumlah Perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka Upaya Penyelesaian Penetapan Batas Wilayah di Laut serta Penegasan dan Pengelolaan batas	70%	70%	70%	70%	70%									
	2. Persentase Hasil Perundingan atau Perjanjian Internasional di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan baik di tingkat Bilateral, Regional maupun Multilateral	80%	80%	80%	80%	80%									
	3. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	70%	70%	70%	70%	70%									
Kegiatan: Diplomasi melalui Pelaksanaan Hukum							2,765	3,041	3,345	3,680	4,048	Dit. Hukum			
	Sasaran Kegiatan: Penguatan Diplomasi melalui Pelaksanaan Hukum														
	1. Persentase Jumlah Kasus yang Diselesaikan	65%	65%	65%	65%	65%									
	2. Persentase Pendapat Hukum yang Disampaikan kepada Stakeholders	90%	90%	90%	90%	90%									
	3. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	70%	70%	70%	70%	70%									
Kegiatan: Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan							10,918	12,010	13,211	14,532	15,985	Dit. PI Polkamwil			
	Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan														
	1. Persentase Jumlah Perundingan yang Berhasil Diselenggarakan dalam rangka Upaya Penyelesaian Penetapan Batas Wilayah di Laut serta Penegasan dan Pengelolaan Batas	70%	75%	80%	85%	90%									
	2. Persentase Pendapat Hukum di Bidang Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan yang Disampaikan kepada Stakeholders	80%	80%	80%	80%	80%									
	3. Persentase Tingkat Pemahaman Stakeholders atas Substansi Hukum di bidang Politik, Keamanan, Kewilayahan dan Kelautan	80%	80%	80%	80%	80%									
	4. Persentase Dokumen Hasil Perundingan atau Perjanjian Internasional di Bidang Politik, Keamanan, Kewilayahan dan Kelautan yang Disepakati	80%	80%	80%	80%	80%									
Kegiatan: Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional							6,069	6,676	7,343	8,077	8,885	Dit. Ekosobud			
	Sasaran Kegiatan: Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya														
	1. Persentase Pendapat Hukum Dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang Disampaikan ke stakeholders	80%	80%	80%	80%	80%									
	2. Persentase Pengelolaan dan Pelayanan Perjanjian Internasional di Treaty Room	80%	80%	80%	80%	80%									
	3. Persentase Hasil Perundingan atau Perjanjian Internasional di bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan baik ditingkat Bilateral, Regional maupun Multilateral	80%	80%	80%	80%	80%									

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis lainnya Direktorat Jenderal						19,366	21,302	23,433	25,776	28,353		
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Ditjen HPI	B (70,05)	71	72	73	74							
	3. Persentase Pegawai yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensinya	85%	85%	85%	85%	85%							
	4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ditjen HPI	95%	95%	95%	95%	95%							
Program: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa	Sasaran Program: Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat						44,345	48,780	53,658	59,023	64,926	Ditjen Amerika dan Eropa	
	1. Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	70%	72%	74%	76%	78%							
	2. Persentase prakarsa/rekomendasi yang diterima dan ditindaklanjuti pada forum kerja sama intrakawasan	80%	80%	80%	80%	80%							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia yang meningkat						2,645	2,909	3,200	3,520	3,872	Dit. Amerika Selatan dan Karibia	
	1. Jumlah Kesepakatan Kerjasama	14	14	14	14	14							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	11	11	11	11	11							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Amerika Utara dan Tengah yang meningkat						4,018	4,420	4,862	5,348	5,882	Dit. Amerika Utara dan Tengah	
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	12	12	12	12	12							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	20	20	20	20	20							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Eropa Barat yang meningkat						2,767	3,044	3,348	3,683	4,051	Dit. Eropa Barat	
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	27	27	27	27	27							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	8	8	8	8	8							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di Kawasan Eropa Tengah dan Timur yang meningkat						2,764	3,041	3,345	3,679	4,047	Dit. Eropa Tengah dan Timur	
	1. Jumlah kesepakatan kerjasama	15	15	15	15	15							
	2. Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	17	17	17	17	17							
Kegiatan: Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa	Sasaran Kegiatan: Peran Indonesia di forum kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa yang						3,173	3,490	3,839	4,223	4,646	Dit. KSI Amerop	
	1. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum kerja sama intrakawasan	17	17	17	17	17							
	2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti	11	11	11	11	11							
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Amerop	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat						28,978	31,876	35,064	38,570	42,427	Setditjen Amerop	
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	95%	95%	95%	95%	95%							
	2. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	B (66)	67	68	69	70							
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	75%	75%	75%	75%	75%							
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	100%	100%	100%	100%	100%							
	5. Persentase pengadaan dan pemuktahiran informasi dan data bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa	100%	100%	100%	100%	100%							
Program: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	Sasaran Program: Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas						28,621	31,483	34,632	38,095	41,904	BPPK	
	1. Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang disetujui oleh Pimpinan Kemlu	70%	70%	70%	70%	70%							
Kegiatan: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Terkait Isu-isu Pada Kawasan Amerika dan Eropa	Sasaran Kegiatan:						2,700	2,970	3,267	3,594	3,953	P3K2 Amerika dan Eropa	
	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri untuk Kawasan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Terkait Isu-isu Pada Kawasan Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika	Sasaran Kegiatan: 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri untuk Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika yang ditindaklanjuti						2,849	3,134	3,447	3,792	4,171	P3K2 Asia Pasifik dan Afrika	
Kegiatan: Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Terkait Isu-isu Pada Organisasi Internasional PBB dan Non-PBB	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional PBB dan Non-PBB yang ditindaklanjuti						2,628	2,891	3,180	3,498	3,848	P3K Organisasi Internasional	
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Sasaran Kegiatan: 1. Persentase rekomendasi terkait data dan isu khusus yang ditindaklanjuti 2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Publik yang Mendukung Kegiatan Kajian 3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya 4. Persentase jumlah peserta sosialisasi/diseminasi kebijakan yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan benar dalam survey tingkat pemahaman 5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPK 6. Persentase jumlah terbitan Majalah/jurnal berkala di BPPK beserta pendistribusiannya yang terlaksana tepat pada waktunya 7. Persentase realisasi penyerapan anggaran untuk layanan perkantoran BPPK 8. Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi peningkatan kinerja BPPK						20,444	22,488	24,737	27,211	29,932	Sekretariat BPPK	
Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokol dan Kekonsuleran	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri						135,973	149,571	164,528	180,980	199,079	Ditjen Protokol dan Konsuler	
	1. Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	11,6	12,3	13,1	13,9	14,7							
	2. Indeks penguatan diplomasi perlindungan	8,7	9,2	9,8	10,5	11,0							
	3. Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri	37,7	40,1	42,6	45,3	47,8							
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Kekonsuleran												
	4. Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	90%	93%	95%	98%	100%							
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokol												
	5. Persentase pelayanan keprotokol yang sesuai dengan Protap yang berlaku	95%	95%	95%	95%	95%							
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik												
	6. Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP	95%	95%	95%	95%	95%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Fasilitas Diplomatik	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas						4,099	4,509	4,960	5,456	6,002	Dit. Fasilitas Diplomatik	
	1. ISO Pelayanan Penerbitan ID Card	95%	95%	95%	95%	95%							
	2. Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi, Sarasehan, dan Pembekalan Fasilitas Diplomatik	80%	80%	80%	80%	80%							
	3. Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP	95%	95%	95%	95%	95%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Kekonsuleran	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas						18,275	20,102	22,112	24,323	26,756	Dit. Kekonsuleran	
	1. Persentase penyelesaian dokumen kekonsuleran secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Persentase tingkat pemahaman peserta yang nilainya di atas 80	80%	82%	83%	84%	85%							
	3. Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran	90%	90%	90%	90%	90%							
	4. Persentase publik yang mendapat respon	100%	100%	100%	100%	100%							
	5. Persentase WNA bermasalah yang difasilitasi	80%	80%	80%	80%	80%							
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan di bidang Perlindungan WNI dan BHI	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas						81,000	89,100	98,010	107,811	118,592	Dit. PWNI/BHI	
	1. Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	11,6	12,3	13,1	13,9	14,7							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	2 Indeks penguatan diplomasi perlindungan	8,7	9,2	9,8	10,5	11,0									
	3 Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri	37,7	40,1	42,6	45,3	47,8									
Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Keprotokolan							3,100	3,410	3,751	4,126	4,539		Dit. Protokol		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas														
	1. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan protap yang berlaku	95%	96%	97%	98%	98%									
	2. Persentase tingkat pemahaman atas Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%									
	3. Persentase jumlah dokumen keprotokolan yang diterbitkan tepat waktu	95%	96%	97%	98%	98%									
Kegiatan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan teknis administrasi serta kualitas prasarana sarana dan kelembagaan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler							29,500	32,450	35,695	39,264	43,190		Setditjen Protokol dan Konsuler		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan														
	1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	100%	100%	100%	100%	100%									
	2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	100%	100%	100%	100%	100%									
	3. Persentase Penyelesaian Laporan Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%									
	4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	71	72	73	74									
	5. Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%									
	6. Persentase penyelesaian ucapan selamat dan simpati dari dan kepada Presiden, Wapres/Menlu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%									
Program: Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik							66,468	73,115	80,426	88,469	97,316		Ditjen IDP		
	Sasaran Program: Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di														
	1. Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%									
	2. Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%									
	3. Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular	75%	77%	79%	80%	80%									
	4. Persentase respon positif terhadap pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia	75%	77%	79%	80%	80%									
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik							20,200	22,220	24,442	26,887	29,575		Dit. Diplomasi Publik		
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik														
	1. Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%									
	2. Persentase kehadiran konstituen domestik/internasional dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%									
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media							5,578	6,136	6,749	7,424	8,167		Dit. Infomed		
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang														
	1. Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia	90%	90%	90%	90%	90%									
	2. Persentase partisipasi publik dalam media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu	60%	60%	60%	60%	60%									
	3. Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan pengelolannya	90%	90%	90%	90%	90%									
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang keamanan informasi, personalia dan kerja sama keamanan diplomatik							2,737	3,010	3,311	3,643	4,007		Dit. Keamanan Diplomatik		
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang														
	1. Jumlah rekomendasi dalam rangka peningkatan standar pengamanan perwakilan RI	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi									
	2. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi									
	3. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan yang diterima dalam setiap pertemuan koordinasi dengan instansi terkait	58 Rekomendasi	58 Rekomendasi	58 Rekomendasi	58 Rekomendasi	58 Rekomendasi									
Kegiatan: Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas							8,302	9,132	10,045	11,049	12,154		Dit. Kerja Sama Teknik		
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang														
	1. Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular	75%	75%	75%	75%	75%									
	2. Jumlah kegiatan penguatan/promosi/pelebaran jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan kerjasama teknik selatan-selatan dan triangular	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan									
Kegiatan: Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik							29,651	32,616	35,878	39,466	43,412		Setditjen IDP		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat														
	1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	95%	95%	95%	95%	95%									

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	2. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	75	75	76	76	76									
	3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	95%	95%	95%	95%	95%									
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%									
Program: Peningkatan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri							25,492	28,041.1	30,845.2	33,929.7	37,322.7	Inspektorat Jenderal			
	Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,														
	1. Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja.	80%	82%	84%	86%	88%									
	Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta														
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	90%	91%	92%	93%	95%									
	Sasaran Program: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan														
	3. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5									
	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan														
	4. Persentase peningkatan dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern Kemlu	85%	86%	87%	88%	90%									
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I							1,145	1,259	1,385	1,524	1,676	Inspektorat Wilayah I			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,														
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah I yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta														
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I.	90%	91%	92%	93%	95%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan														
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah I	70%	72%	75%	78%	80%									
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah I yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5									
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II							1,414	1,555	1,710	1,881	2,070	Inspektorat Wilayah II			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,														
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah II yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta														
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	90%	91%	92%	93%	95%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan														
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah II	70%	72%	75%	78%	80%									
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah II yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5									
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri III							1,312	1,443	1,587	1,746	1,921	Inspektorat Wilayah III			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,														
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah III yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta														
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	90%	91%	92%	93%	95%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan														
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi dan pendampingan Inspektorat Wilayah III	70%	72%	75%	78%	80%									
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah III yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5									
Kegiatan: Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Amerika, Karibia, Pasifik dan Kenterian Luar Negeri IV							1,496	1,646	1,810	1,991	2,190	Inspektorat Wilayah IV			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis,														
	1. Persentase satuan kerja di Inspektorat Wilayah IV yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja	80%	82%	84%	86%	88%									
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta														
	2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	90%	91%	92%	93%	95%									

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan														
	3. Persentase kepuasan Satuan Kerja atas pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan koordinasi oleh Inspektorat Wilayah IV	70%	72%	75%	78%	80%									
	4. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja di Wilayah IV yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5	Indeks 5									
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal							20,125	22,138	24,352	26,787	29,466				Sekretariat Inspektorat Jenderal
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan														
	1. Persentase laporan analisis temuan dan tindak lanjut yang dapat dimanfaatkan stakeholders terkait	80%	82%	85%	88%	90%									
	2. Persentase APIP Itjen yang memiliki kompetensi "Baik"	85%	85%	85%	85%	85%									
	3. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan anggaran	90%	91%	92%	93%	95%									
	4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal	90%	90%	90%	90%	90%									
Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri							4,835,339	5,318,873	5,850,760	6,435,836	7,079,420				Sekretariat Jenderal
	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi														
	1. Indeks kepuasan pegawai	55%	58%	60%	63%	65%									Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
	2. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri	70 (B)	72	75	76	77									Biro Perencanaan dan Organisasi
	3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP									Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
	4. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	50%	55%	60%	65%	70%									Biro Kepegawaian
	5. Persentase penerapan cetak biru teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri	55%	68%	82%	96%	97%									Pusat Komunikasi
Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri							338,691	372,560	409,816	450,797	495,877				Biro Perlengkapan
	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana														
	1. Persentase sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang dipenuhi	95%	95%	95%	95%	95%									
Kegiatan: Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri							17,833	19,617	21,578	23,736	26,110				BAM
	Sasaran Kegiatan: Dukungan Layanan Pimpinan Kemlu yang Optimal														
	1. Indeks tingkat kepuasan Pimpinan Kemlu atas dukungan layanan BAM	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)	60 < x ≤ 80 (Memuaskan)									
	2. Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan Kemlu yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%									
Kegiatan: Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian dan Perwakilan							17,314	19,045	20,950	23,045	25,349				BAKP
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya														
	1. Persentase jumlah kegiatan Satker Kemlu serta Lembaga Pemerintah Lainnya dan Lembaga Non Pemerintah yang digabungkan	80%	83%	85%	85%	85%									
	2. Persentase calon Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan yang menyatakan "puas" atas pelayanan BAKP	80%	80%	83%	85%	85%									
	3. Persentase naskah peraturan dan produk hukum yang masuk dari Satker/Perwakilan sesuai dengan standar format Kementerian Luar Negeri	80%	82%	85%	85%	85%									
	4. Persentase Perwakilan yang menyatakan "puas" atas pengiriman kantong diplomatik	80%	83%	85%	85%	85%									
	5. Volume arsip yang telah ditertibkan	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari	1000 Meter Lari									
	6. Persentase kepuasan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden terhadap pelayanan BAKP	80%	83%	85%	85%	85%									
Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri							259,002	284,903	313,393	344,732	379,205				Biro Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pengelolaan sumber daya														
	1. Persentase peningkatan pemahaman pegawai Kementerian Luar Negeri mengenai peraturan dan kebijakan kepegawaian	65%	70%	75%	75%	75%									
	2. Persentase peningkatan kepuasan pegawai terhadap pelayanan Biro Kepegawaian	50%	60%	70%	80%	90%									
	3. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	60%	70%	80%	90%	95%									
	4. Tersusunnya dokumen pedoman evaluasi atas kinerja diplomat	1	-	-	-	-									
	5. Tersusunnya dokumen hasil evaluasi atas kinerja diplomat	1	1	1	1	1									
Kegiatan: Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar Negeri							155,012	170,514	187,565	206,321	226,954				Biro Keuangan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen keuangan dan teknis keuangan														
	1. Persentase penyelesaian dokumen keuangan tepat waktu	80%	85%	90%	90%	95%									
	2. Persentase kasus-kasus keuangan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	90%	95%									

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	3. Persentase serapan anggaran Kemlu	80%	85%	90%	95%	95%									
Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri							12,050	13,255	14,581	16,039	17,643	Biro Perencanaan dan Organisasi			
	Sasaran Kegiatan: Kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri yang berfokus strategi organisasi														
	1. Jumlah satker yang memiliki evaluasi AKIP "baik"	22	32	42	52	62									
	2. Persentase unit organisasi yang menerapkan sistem kerja	80%	82%	85%	88%	90%									
	3. Persentase deviasi pagu anggaran Kemlu antara perencanaan dan dokumen anggaran	5%	5%	5%	5%	5%									
	4. Persentase penyelesaian penataan organisasi di Kemlu dan Perwakilan RI	80%	82%	85%	88%	90%									
Kegiatan: Pengelolaan Perlengkapan serta Urusan							85,668	94,235	103,659	114,025	125,427	Biro Perlengkapan			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana														
	1. Persentase administrasi dan operasional perkantoran yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%									
	2. Persentase penatausahaan BMN yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%									
	3. Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek dan Sosialisasi dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%									
	4. Persentase sarana dan prasarana Kemlu dan Perwakilan RI yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%									
Kegiatan: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik							55,280	60,808	66,889	73,577	80,935	Pusdiklat			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi														
	1. Persentase Kelulusan Peserta Diklat yang Memiliki Nilai Minimal 70	98%	98%	98%	98%	98%									
	2. Persentase Hasil Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%									
	3. Persentase (%) Tingkat Kepuasan Peserta atas Pelaksanaan Diklat	80%	82%	84%	86%	87%									
	4. Persentase Kerjasama Lembaga Diklat dengan Negara atau Lembaga Lain	75%	75%	75%	78%	80%									
Kegiatan: Dukungan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri							93,652	103,017	113,319	124,651	137,116				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Melalui Sistem Informasi dan														
	1. Persentase Rencana Induk Strategis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Diterapkan	10%	20%	30%	40%	50%						Puskom			
	2. Indeks Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,2	4,63	4,71	4,79	4,87						Puskom, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Nasional (BIN)			
	3. Rasio Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Perwakilan RI	0,8	0,85	0,9	0,95	1						Puskom			
	4. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	2,7	2,7	2,8	2,85	2,9						Puskom			
	5. Persentase Tingkat Penerapan Keamanan Informasi dan Komunikasi	60%	70%	80%	90%	100%									
	6. Persentase Dukungan Manajemen di Pusat Komunikasi	85%	88%	91%	93%	95%						Puskom			
Kegiatan: Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Perwakilan RI							4,478,217	4,926,039	5,418,643	5,960,507	6,556,557	Perwakilan RI			
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama														
	1. Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindaklanjuti stakeholders	70%	75%	80%	85%	90%									
	2. Persentase rencana aksi sebagai implementasi dari dokumen perjanjian/kesepakatan	70%	75%	80%	85%	90%									
	3. Persentase peningkatan trade, tourism and investment	5%	5%	5%	5%	5%									
	4. Persentase Permasalahan/Kasus/Bantuan hukum WNI dan BHI di Luar negeri yang diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%									

LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET SELESAI
1	2	3	4	5	6
1	Revisi atas UU Hubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999	1. Perkembangan dan dinamika penyelenggaraan hubungan luar negeri 2. Kebutuhan untuk melakukan kalibrasi prioritas kebijakan luar negeri 3. Keperluan untuk menyempurnakan materi muatan hubungan luar negeri 4. Inisiatif revisi UU Hubungan Luar Negeri dari Dewan Perwakilan Rakyat	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri	DPR, KEMHUMHAM, KEMDAGRI, KEMENKOPOLHUHKAM, PEMDA	2017

